



PELAKSANAAN PERAN KEJAKSAAN DALAM PENINDAKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DI PROVINSI PAPUA

TESIS

*Diajukan sebagai persyaratan Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

LEILY SRIWIDIANTI
NIM. 2020025015055

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PELAKSANAAN PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DI PROVINSI PAPUA**

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal, 27 Juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002

Pembimbing II



Dr. Nur Aswarani, S.H.,M.H
NIP. 19630913 199003 2 002

Mengetahui

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**



Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

PELAKSANAAN PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI PROVINSI PAPUA

Telah diujikan di depan Dewan Penguji Ujian Tesis

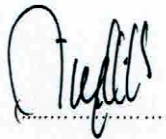
pada Tanggal: 27 Juni 2022

Dewan Penguji,

Ketua/Anggota : Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002

()

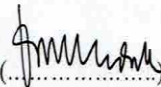
Sekretaris/Anggota : Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H
NIP. 19630913 199003 2 002

()

Anggota : Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

()

Anggota : Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H
NIP. 19830816 200604 2 004

()

Anggota : Dr. Basir Rohrohmana, S.H.,M.Hum
NIP. 19641009 199003 1 003

(.....)

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, 17 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

LEILY SRIWIDIANTI
NIM. 2020025015055

ABSTRAK

Penelitian tentang Pelaksanaan Peran Kejaksaan Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua dilakukan untuk Penindakan dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Papua dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, menggunakan metode Penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan data sekunder berupa bahan hukum, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan penindakan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan oleh jaksa intelijen dan jaksa penyidik serta penuntut umum. Jaksa Intelijen menjadi bagian dalam proses penindakan, yakni melalui pelaksanaan fungsi intelijen kejaksaan yaitu menyelidiki dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan data, yang kemudian diserahkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti dalam proses penyidikan. Dalam pelaksanaan penindakan, ditemukan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa, antara lain pemalsuan dokumen kontrak, perubahan kontrak dan pemalsuan dokumen pencairan. Hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penindakan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya aparat kejaksaan dan terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan penindakan khususnya pada tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, hambatan terkait pemeriksaan saksi ahli khususnya dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

Untuk memaksimalkan penindakan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, terkait dengan kendalan internal maka disarankan agar dilakukan peningkatan aparat kejaksaan baik kuantitas maupun kualitasnya, serta penambahan biaya yang dapat mendukung berbagai kegiatan dalam rangka penindakan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait dengan kendala eksternal, disarankan kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada penegak hukum apabila terdapat kecurigaan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, melakukan kerjasama dengan BPK atau BPKP agar audit kerugian keuangan negara tidak terlambat.

Kata kunci: Penindakan, korupsi, pengadaan barang dan jasa.

ABSTRACT

Research on the Implementation of the Role of the Prosecutor's Office in the Prosecution of Corruption in the Procurement of Goods and Services for the Papua Provincial Government is carried out to take action and the obstacles faced by the Papua High Prosecutor's Office in corruption crimes in the procurement of government goods and services, using the normative legal research method, through a legal approach, conceptual approach and case approach with secondary data in the form of legal materials, which were collected through literature study and analyzed qualitatively.

The prosecution of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services by the Papua High Court is carried out by intelligence prosecutors and investigating prosecutors as well as public prosecutors. The Intelligence Prosecutor is a part of the prosecution process, namely through the implementation of the prosecutor's intelligence function, namely an investigation in the context of collecting information and data, which is then submitted to the investigator for follow-up in the investigation process. In carrying out the action, several things were found that caused corruption in the procurement of goods and services, including falsification of contract documents, changes to contracts and falsification of disbursement documents. Obstacles faced by the prosecutor's office in taking action against corruption in the procurement of goods and services, including limited facilities and infrastructure, lack of prosecutors and limited ability to carry out prosecutions, especially in the case of corruption in the procurement of goods and services, obstacles related to the examination of expert witnesses, especially in calculating losses. state finances.

To maximize action against corruption in the procurement of government goods and services, related to internal constraints, it is recommended that the prosecutor's office be increased both in quantity and quality, as well as increase costs that can support various activities in the context of taking action against corruption in the procurement of government goods and services. Regarding external constraints, it is suggested to the public to immediately report to law enforcement if there is a suspicion of suspected criminal acts of corruption in the procurement of goods and services, cooperate with BPK or BPKP so that the audit of state financial losses is not too late.

Keywords: Action, corruption, procurement of goods and services.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Bekerja dan berusahalah karena usaha tidak pernah membohongi hasil.

(Leily)

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua terkasih Ayahanda Djufri Achmad Sahara dan Ibunda Hj. Nyi Ati Ukry, SPd, atas doa dan kasih sayang mereka.
2. Suami tercinta Yusuf Irianto, SE dan anak-anak kami tersayang Muhammad Abimanyu dan Aisyah Sabila Zahra, yang dengan penuh cinta mengorbankan waktu dan kebahagiaan bersama demi meraih cita-cita.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Maha Penyayang atas ridho dan curahan rahmatNya yang berlimpah sehingga penulisan Tesis ini dapat dilakukan dan selesai dengan baik dalam rangka menyelesaikan studi pada Strata Dua (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih di Jayapura.

Penulisan Tesis ini dapat selesai dengan baik berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu sebagai apresiasi penulis patut menyampaikan terimah kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT, selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas segala kemudahan yang diberikan sehingga dapat menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah mengarahkan, membimbing dengan sabar sehingga Tesis ini dapat selesai dengan baik.
4. Ibu Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar membantu dalam mengarahkan penulisan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan hukum.
6. Bapak dan ibu Staf administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungan yang diberikan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum pidana, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jayapura, 21 Juni 2022

Leily

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	i
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN TIDAK DUPLIKAT.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	14
B. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi	24
C. Institusi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi .	34
D. Penyidikan Tindak Pidana.....	58
E. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	63
F. Landasan Teori.....	73
G. Kerangka Pikir.....	85
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penindakan Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Peme- rintah oleh Kejaksaan Tinggi Papua.....	86
B. Kendala Kejaksaan Tinggi Papua Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	107
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	117
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119